

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini dapat memberikan informasi secara baik dan komprehensif tentang pencapaian kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019, untuk selanjutnya berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam memberikan kepastian serta pengendalian pada pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak guna peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai Visi "**Masyarakat memperoleh kepastian hukum**" serta menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik dengan sistem nilai kami "**PASTI**".

Palangka Raya, 08 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah



ILHAM DJAYA
NIP. 196412201991031002

IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ini adalah gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mempergunakan anggaran belanja tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, keberhasilan yang dicapai serta hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019.

Adapun 9 (sembilan) program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM, dengan anggaran sebesar Rp 10.572.367.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.534.856.406,- atau sebesar 99,65% ;
2. Program Administrasi Hukum Umum dengan anggaran sebesar Rp 1.900.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.861.551.977,- atau sebesar 97,98%;
3. Program Pembinaan /Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, dengan anggaran sebesar Rp. 153.729.000,- dan realisasi sebesar Rp. 152.292.780,- atau sebesar 99,07%;
4. Program Pembentukan Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 205.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 203.021.948,- atau sebesar 99,04%;
5. Program Pemajuan HAM, dengan anggaran sebesar Rp. 224.515.000,- dan realisasi sebesar Rp. 216.143.400,- atau sebesar 96,27% ;
6. Program Pembinaan Hukum Nasional , dengan anggaran sebesar Rp 879.402.000,- dan realisasi sebesar Rp 878.498.7910,- atau sebesar 99,90% ;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dengan anggaran sebesar Rp 42.221.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.865.000,- atau sebesar 96,79%;
8. Program Pembinaan dan Penyelenggaran Pemasarakatan, dengan anggaran sebesar Rp 624.138.000,- dan realisasi sebesar Rp 621.397.148,- atau sebesar 99,56% ;
9. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, dengan anggaran sebesar Rp 578.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 576.711.566 ,- atau sebesar 99,78%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah	3
1.5 Struktur Organisasi Kantor Wilayah	4
1.6 Kondisi Satuan Kerja dan SDM.....	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	62
3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja.....	63

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai harapan Bangsa Indonesia.

Untuk mencapai *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip prinsip *Good Governance*. Akuntabilitas juga merupakan salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagai pedoman perwujudan Akuntabilitas, maka pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk/perwujudan dari akuntabilitas yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang saat ini diubah namanya menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi yang ditetapkan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Laporan Kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di tahun mendatang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2019 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* ;
2. Perwujudan Akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah ;
3. Mengetahui dan menilai capaian kinerja, keberhasilan serta hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sepanjang tahun 2019 ;
4. Menjadikan Kantor Wilayah di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya sesuai dengan tata nilai '**KAMI PASTI**'.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dan tinjauan dalam melakukan Penyusunan LKIP :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.

1.4 Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di pusat yang berkedudukan di provinsi dalam menjalankan program pembangunan hukum di daerah tetap mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas	Fungsi
Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan b. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

1.5 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

KEPALA KANTOR WILAYAH Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.	
DIVISI ADMINISTRASI : Sucipto, S.H., M.H., M.Kn.	
<p>Bagian Program dan Hubungan Masyarakat : Diana Soekowati, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bagian Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran 2. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi 3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan 4. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan 	<p>A. Sub Bagian Program dan Pelaporan : H. Ahmadi, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan</p> <p>B. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi :-</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerjasama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data</p>
<p>Bagian Umum : H. Mahrijuni, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian 2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara 3. Pengelolaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia 4. Pelaksanaan urusan urusan tata usaha dan rumah tangga. 	<p>A. Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga : Khudloifah, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga</p> <p>B. Sub Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara : Liyana, S.Ag., M.Si.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara</p>

DIVISI PEMASYARAKATAN : Hanibal, Bc.IP., S.H.	
<p>Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi : Jevius Jizreel Siathen, Bc.IP.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama 2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. 	<p>A. Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama : Pirhansyah, S.E.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama</p> <p>B. Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak : Edy Suprianto, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang kemasyarakatan dan pengentasan anak.</p>
<p>Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan: Arief Gunawan, Bc.IP., S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 	<p>A. Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi : Santosa, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi</p> <p>B. Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan : Joko Prayitno, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan</p>

<p>2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</p>	<p>dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban</p>
<p>DIVISI KEIMIGRASIAN : Ignatius Purwanto, S.H.</p>	
<p>Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian : Tri Sasongko Tjatur Sas Karna Djaja, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi Keimigrasian; 2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi Keimigrasian. 	<p>A. Sub Bidang Perizinan Keimigrasian : Setijo Pamadi, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.</p> <p>B. Sub Bidang Informasi Keimigrasian : -</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.</p>
<p>Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian : -</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p>	<p>A. Sub Bidang Intelijen Keimigrasian : Erdiansyah, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.</p>

<p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 	<p>B. Sub Bidang Penindakan Keimigrasian : Muhammad Desri</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.</p>
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM : Cahyani Suryandari, S.H., M.H.</p>	
<p>Bidang Pelayanan Hukum : Budi Haryono, S.H., M.Si.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. 	<p>A. Sub Bidang Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum: Benny Yuandrias, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.</p> <p>B. Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual : Erna Sulistyowaty, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.</p>
<p>Bidang Hukum : Agustina Daya Leluni, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,</p>	<p>A. Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah : Laila Rahmawati, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan</p>

<p>pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di wilayah.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Penyuluh Hukum di wilayah. 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah. 	<p>dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di wilayah.</p> <p>B. Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: Anggun Prasetyo Nugroho, S.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah..</p>
<p>Bidang Hak Asasi Manusia : Karyadi, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi pengiayan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi 	<p>A. Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia : Woro Sadarini, S.H., M.H.</p> <p><u>Tugas :</u></p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.</p> <p>B. Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia : Septi Nurhayati, S.E., M.Si.</p>

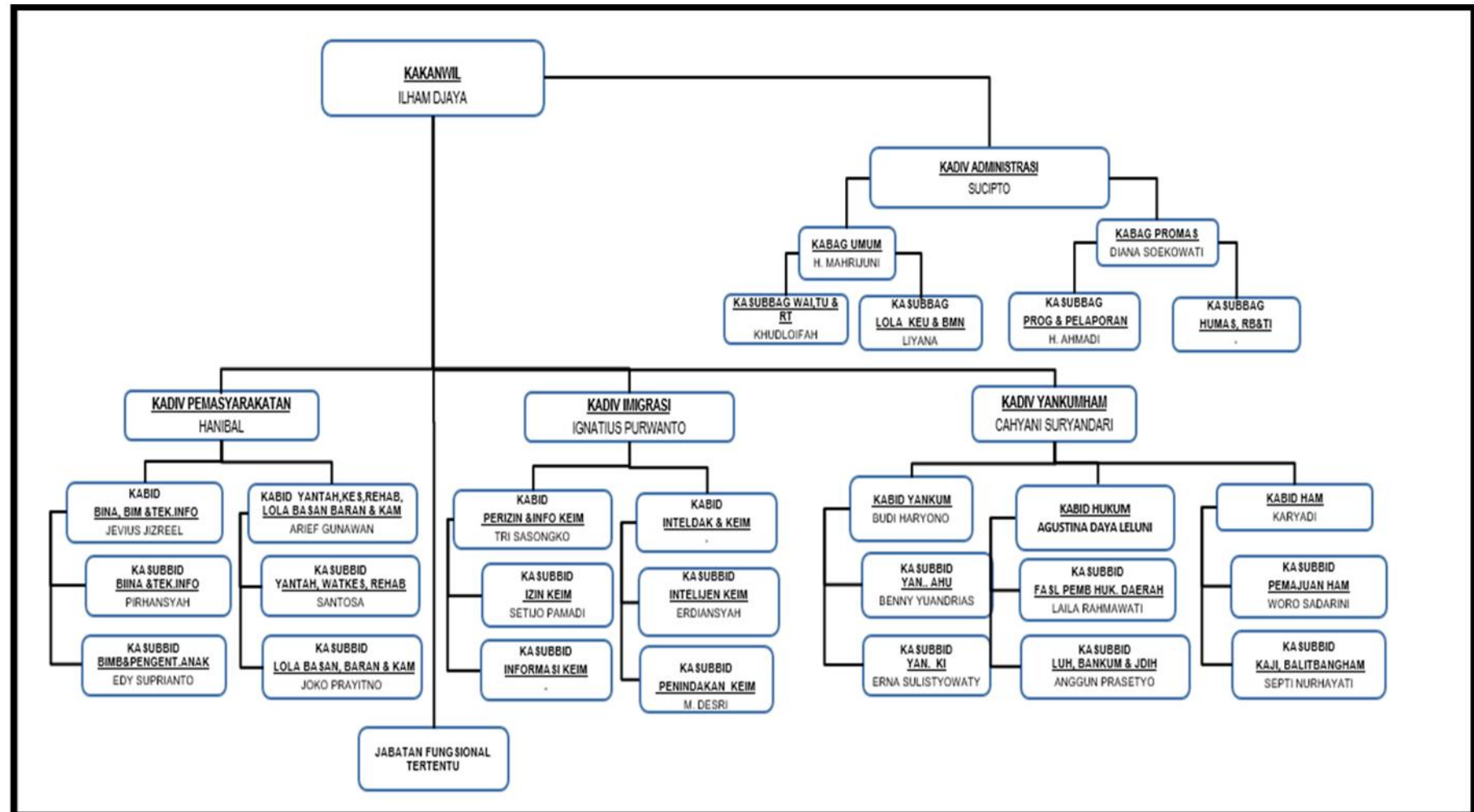
hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia

2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kalimantan Tengah



1.6 Kondisi Satuan Kerja dan SDM Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas 4 (empat) divisi yaitu : Divisi Administrasi, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Pemasarakatan, Divisi Imigrasi, serta 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

A. Kondisi Pegawai

1. Jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Kantor Wilayah

No	Divisi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Divisi Administrasi	24	22	45
2	Divisi Pemasarakatan	15	5	20
3	Divisi Imigrasi	8	3	11
4	Divisi Pelayanan Hukum	21	18	39
	Jumlah	68	48	116

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai di Lapas

No	UPT / Satker	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lapas Kelas IIA Palangka Raya	75	24	99
2	Lapas Kelas IIB Sampit	71	5	76
3	Lapas Kelas IIB Muara Teweh	47	4	51
4	Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun	67	9	76
5	Lapas Kelas III Sukamara	45	5	50
6	LPKN Kelas III Kasongan	40	7	47
7	LPKA Kelas II Palangka Raya	34	5	39
8	LPP Kelas IIA Palangka Raya	12	37	49
	Jumlah	391	96	487

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Rutan

No	UPT / Satker	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Rutan Kelas II Palangka Raya	64	16	80
2	Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas	52	8	60
3	Rutan Kelas IIB Tamiang Layang	30	6	36
4	Rutan Kelas IIB Buntok	44	12	56
	Jumlah	190	42	232

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai di Bapas

No	UPT / Satker	Pria	Wanita	Jumlah
1	Bapas Kelas II Palangka Raya	22	10	32
2	Bapas Kelas II Pangkalan Bun	12	6	18
3	Bapas Kelas II Muara Teweh	10	2	12
	Jumlah	44	18	62

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai di RUPBASAN

No	UPT / Satker	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Rupbasan Kelas I Palangka Raya	16	6	22
	Jumlah	16	6	22

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai di Kantor Imigrasi

No	UPT / Satker	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Kanim Kelas I Palangka Raya	23	14	37
2	Kanim Kelas II Sampit	28	10	38
	Jumlah	51	24	75

Dari tabel di atas maka jumlah pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah didominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 760 orang atau sebesar 76,4 % dari seluruh total 994 orang pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

- Jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berdasarkan Golongan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Satuan Kerja	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	19	78	19	116
2	Lapas Kelas IIA Palangka Raya	48	49	2	99
3	Lapas Kelas II B Pangkalan Bun	49	26	1	76
4	Lapas Kelas IIB Sampit	54	21	1	76
5	Lapas Kelas IIB Muara Teweh	30	20	1	51

No	Satuan Kerja	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
6	Rutan Kelas IIA Palangka Raya	40	40	-	80
7	Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas	31	29	-	60
8	Rutan Kelas IIB Buntok	35	20	1	56
9	Bapas Kelas II Palangka Raya	9	23	-	32
10	Bapas Kelas II Muara Teweh	3	9	-	12
11	Bapas Kelas II Pangkalan Bun	5	12	1	18
12	Rupbasan Kelas I Palangka Raya	8	14	-	22
13	Kanim Kelas I Palangka Raya	10	26	1	37
14	Kanim Kelas II Sampit	9	29	-	38
15	LPKN Kasongan	37	10	-	47
16	Rutan Tamiyang Layang	30	6	-	36
17	LP Khusus Anak Kelas IIA Palangka Raya	25	13	1	39
18	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya	36	11	2	49
19	Lapas Kelas III Sukamara	45	5	-	50
	Jumlah	523	441	30	994

Dari data di atas maka terlihat bahwa jumlah pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah didominasi oleh Golongan II dengan jumlah 523 orang pegawai atau 52,6 % .

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Golongan yaitu :

1. Golongan II sebanyak 523 orang (52,6 %),
2. Golongan III sebanyak 441 orang (44,4 %),
3. Golongan IV sebanyak 30 orang (3 %).

B. Rekapitulasi Penghargaan Yang Diterima di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Tanggal	Link Website	Keterangan
1	28-Jan-19	LUAR BIASA KAKANIM KELAS II TPI SAMPIT RAIH PREDIKAT TERBAIK KETIGA LOMBA KARYA TULIS TELAHAHAN STAF HBI 2019	Penghargaan dari Menkumham yang diserahkan Kakanwil Kemenkumham Kalteng sebagai Juara III Lomba Karya Tulis
2	19-Feb-19	Rutan Palangka Raya Raih Predikat Terbaik III Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Penghargaan terbaik III sebagai UPT dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2018
3	06-Mar-19	Rutan Kelas IIA Palangka Raya Mendapatkan penghargaan dalam acara Treasury Award yang diadakan oleh KPPN Palangka Raya ...	Penghargaan Treasury Award dari KPPN Palangka Raya
4	29-Mar-19	Kemenkumham Kalimantan Tengah Torehkan Banyak Prestasi di Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN)	Juara 3 kategori Lukisan oleh Rutan Kelas IIA Palangkaraya
			Juara 3 kategori Lukisan oleh Rutan Kelas IIA Palangkaraya
			Juara 2 kategori Produk Karya Seni Terbaik (Getah Nyatu)
			Juara 2 kategori Produk Karya Seni Terbaik (Getah Nyatu)
			Juara 3 kategori Pakaian Adat
			Piagam atas Demo Kerajinan
			Piagam atas Souvenir Teretnik
5	10-Des-19	https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4122-kakanwil-mengahdiri-peringatan-hari-ham-sedunia-ke-71-di-bandung	Tahun 2019 ini ada 1 Kota dan 6 Kabupaten di Kalimantan Tengah yang mendapatkan predikat Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2019, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Pulang Pisau
6	17-Des-19	https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4172-wujudkan-pembinaan-kepada-wbp-dan-pembangunan-terhadap-rutan-kelas-ii-b-tamiang-layang-dprd-barito-timur-berikan-penghargaan-sebagai-bentuk-apresiasi	Penghargaan secara simbolis atas terwujudnya pembinaan kepada WBP dan Pembangunan di Rutan Tamiang Layang
7	19-Des-19	https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4161-dalam-rangka-suksesnya-pemilu-2019-lapas-kelas-iib-pangkalan-bun-dapatkan-penghargaan	Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena sudah ikut serta dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah merupakan instansi vertikal perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah, meliputi fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Pemasarakatan, Unit Imigrasi, Administrasi serta Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan bidang hukum dan HAM yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019.

Adapun Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengacu pada visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :

Visi

“ Masyarakat memperoleh kepastian Hukum “

Misi

-) Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas
-) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
-) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
-) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
-) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM
-) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas

Tata Nilai

Sebagai pedoman saat melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan nilai-nilai yang dijunjung dan dipedomi oleh seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat "PASTI" dijabarkan sebagai :

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif

2.2 Perjanjian Kinerja

Adapun rencana kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	1 Dokumen	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Hukum dan HAM	10.572.367
		2. Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	12 bulan		
		3. Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	12 bulan		
		4. Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	12 bulan		
		5. Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	12 bulan		
		6. Jumlah layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar	12 bulan		
		7. Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di Kantor Wilayah yang sesuai dengan kebutuhan	12 bulan		
2.	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Kantor Wilayah	1. Terlaksananya Layanan Fidusia	2 Laporan	Program Administrasi Hukum Umum	1.900.000
		2. Terlaksananya Layanan Kewarganegaraan	3 laporan		
		3. Terlaksananya Layanan Kenotariatan	2 Laporan		
		4. Terlaksananya Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	2 Laporan		

		5. Terlaksananya Pemantauan dan Koordinasi	2 Laporan		
		6. Terlaksananya Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	1 Laporan		
		7. Terlaksananya Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum	1 Dokumen		
3.	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kalimantan Tengah yang berkualitas baik sekali	1. Persentase penyelesaian penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	153.729
		2. Terlaksananya Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	80%		
		3. Terselenggaranya Inventarisasi KI Komunal	80%		
		4. Terlaksananya Pendaftaran dan Pengawasan Indikasi Geografis	80%		
		5. Terlaksananya Pencegahan pelanggaran HKI di wilayah	80%		
		6. Terlaksananya Penyelesaian pengaduan pelanggaran KI di Kanwil	80%		
4.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum daerah	1. Persentase (%)Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%	Program Pembentukan Hukum	205.000
		2. Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi Perancangan Peraturan Perundang-undangan	35 Orang		
5.	Diseminasi HAM	1. Pelaksanaan Diseminasi HAM Kab/Kota	1 Kabupaten	Program Pemajuan HAM	224.515
	Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di Wilayah	1. Pelaksanaan Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di wilayah	1 Kegiatan		
		2. Pelaksanaan Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di Pusat	1 Kegiatan		
	Telaah/Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM	1. Inventarisasi dan Identifikasi Produk Hukum Daerah (Kab/Kota)	1 Kegiatan		
2. FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM		1 Kegiatan			

		3. Telaah Dan Rekomendasi Produk Hukum daerah	1 Kegiatan		
	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1. Penelaahan Komunikasi Masyarakat	4 Kegiatan		
		2. Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat	3 Kegiatan		
		3. Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1 Kegiatan		
	Aksi HAM Pemerintah Daerah	1. Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	1 Kegiatan		
		2. Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	1 Kegiatan		
		3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan		
	Kabupaten/Kota Peduli HAM	1. Evaluasi dan persiapan penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM	1 Kegiatan		
		2. Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota peduli HAM	1 Kegiatan		
		3. Pemeriksaan data Usulan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	4 Kegiatan		
		4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan		
6	Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah didukung Perencanaan hukum di tingkat daerah, Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah, Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	1. Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	82 Kasus	Program Pembinaan Hukum Nasional	879.402
	2. Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan			
	3. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayah	1 Daerah			
	4. Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Daerah			
	5. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah			
	6. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Daerah			

		7. Pelatihan / Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Peserta		
7	Melaksanakan Pengkajian HAM di Wilayah	1. Kajian Hak Asasi Manusia	1 Kegiatan	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	42.221
	Melaksanakan Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan HAM di Wilayah	2. Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM	1 Kegiatan		
8	Terselenggaranya Pemasarakatan di Wilayah	1. Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	10 Bulan	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	624.138
		2. Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan	20 Kegiatan		
		3. Pemberian Remisi	1 Tahun		
		4. Pameran	2 Kegiatan		
		5. Koordinasi Dilkumjakpol	1 Kegiatan		
		6. Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di wilayah	1 Kegiatan		
		7. Konsultasi Teknis Pedoman dan Indikator Penilaian Pelaksanaan Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum	1 Kegiatan		
		8. Konsultasi Teknis Intelijen Pemasarakatan dan Standar Operasional Prosedur Pengamanan pada Lapas maksimum, medium dan minimum	1 Kegiatan		
		9. Koordinasi Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	3 Kali		
		10. Koordinasi Teknis Pemasarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	3 Kali		
		11. Pencegahan dan Penindakan Kamtib berupa Pelaksanaan Razia dan Tes Urine bagi	7 Kali		

		Pegawai dan Warga Binaan Masyarakatan			
		12. Mutasi/Pemindahan Narapidana	1 Paket		
		13. Monitoring dan Evaluasi UPT Masyarakatan	6 Kali		
9.	Terselenggaranya Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan	288 LHK	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	578.000
		2. Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang dilaksanakan sesuai ketentuan dari Permohonan yang masuk	672 Dokumen		
		3. Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	8780 Dokumen		
		4. Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	8 Layanan		
		5. Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	94 Orang		
		6. Jumlah Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan	5 LHK		
		7. Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	200 Pemeriksaan		
		8. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya	2 Layanan		
		9. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan		
		10. Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2019 dapat dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 dengan realisasi tahun 2019.

Pengukuran Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi yang dicapai Tahun 2019}}{\text{Target yang telah ditentukan pada Tahun 2019}} \times 100\%$$

Berdasarkan Sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, maka untuk tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah telah mencapai kinerja sebagai berikut :

SASARAN 1 :

Terlaksananya Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 1 adalah Terlaksananya layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjukkan melalui Capaian Kinerja dari indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	100%
3	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	12 bulan	12 bulan	100%
4	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	100%
5	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	12 bulan	12 bulan	100%

6	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di Kantor Wilayah yang sesuai dengan kebutuhan	12 bulan	12 bulan	100%
---	--	----------	----------	------

Beberapa informasi penting tentang capaian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1.1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah telah menyusun 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2020. Realisasi sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 1.2 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Jumlah Layanan Kepegawaian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah berupa :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian
2. Fit dan Proper Test : Pejabat Eselon V sebanyak 74 orang
3. Baperjakat Eselon IV dan V sebanyak 5 kali
4. Mutasi, Promosi dalam lingkungan Kanwil (Eselon IV, V dan JFU)

Target Jumlah Kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah 12 (dua belas) bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 1.3 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Layanan Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah berupa :

1. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi BMN (SABMN)
2. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan antar satuan kerja dalam wilayah
3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dengan Pusat (Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI)

Layanan keuangan yang ditargetkan tahun 2019 dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 1.4 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Layanan BMN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah berupa :

1. Pembinaan dan Pengelolaan BMN antar satuan kerja dalam wilayah
2. Pembinaan dan Pengelolaan BMN dengan Pusat (Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI)

Target Jumlah Layanan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah 12 (dua) bulan dan seluruhnya dapat direalisasikan di tahun 2019, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 1.5 Jumlah layanan Ketatausahaan yang akurat dan akuntabel

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Jumlah Layanan Ketatausahaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah berupa :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Target Jumlah Ketatausahaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah 12 (dua) bulan dan direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 1.6 Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di Kantor Wilayah yang sesuai dengan kebutuhan

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Jumlah Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah berupa :

1. Pengadaan pakaian dinas pegawai Kanwil
2. Sewa mobil untuk pejabat Eselon II yaitu Kepala Divisi Administrasi

Target Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah tahun 2019 dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

SASARAN 2 :

Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Kantor Wilayah

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 2 adalah Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di Kantor Wilayah yang ditunjukkan dari capaian kinerja pada indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Layanan Fidusia	2 laporan	2 laporan	100%
2	Terlaksananya Layanan Kewarganegaraan	3 laporan	1 laporan	33,33%
3	Terlaksananya Layanan Kenotariatan	2 laporan	2 laporan	100%
4	Terlaksananya Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	2 laporan	2 laporan	100%
5	Terlaksananya Pemantauan dan Koordinasi	2 laporan	2 laporan	100%
6	Terlaksananya Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	1 laporan	1 laporan	100%
7	Terlaksananya Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum	1 dokumen	1 dokumen	100%

Beberapa informasi penting tentang capaian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 2.1 Terlaksananya Layanan Fidusia

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya layanan fidusia tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) laporan dan realisasi laporan yang dihasilkan yaitu :

1. Laporan Sosialisasi Fidusia

Sosialisasi Fidusia diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah tanggal 19 Maret 2019

2. Laporan Digitalisasi Fidusia

Kegiatan Digitalisasi arsip Fidusia dilakukan di Kantor Wilayah dan selesai dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019

Dengan terealisasinya kegiatan sesuai target maka capaian kinerja tercapai 100%.

Indikator 2.2 Terlaksananya Layanan Kewarganegaraan

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya layanan kewarganegaraan tahun 2019 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) laporan sedangkan realisasi laporan yang dihasilkan hanya berjumlah 1 (satu) laporan yaitu :

1. Laporan sosialisasi kewarganegaraan

Kegiatan diselenggarakan bekerjasama dengan Ditjen AHU tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya permohonan yang masuk sepanjang tahun 2019 (NIHIL) sehingga menyebabkan target kinerja tidak dapat tercapai 100% adalah :

1. Permohonan Kewarganegaraan

2. Pelantikan Kewarganegaraan

Jadi realisasi berbanding target yang ditetapkan maka capaian kinerja adalah 33,33%.

Indikator 2.3 Terlaksananya Layanan Kenotariatan

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya layanan kenotariatan tahun 2019 ditetapkan sebanyak 2 (dua) laporan dan yang dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) laporan yaitu :

1. Rapat Koordinasi Kenotariatan

Diselenggarakan pada tanggal 23 – 24 April 2019 bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya

2. Pelantikan Notaris

Sepanjang tahun 2019 terdapat 1 (satu) kali pengambilan sumpah jabatan notaris oleh Kepala Kantor Wilayah pada tanggal 11 Januari 2019 atas nama Eduardus Haryolukito, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Lamandau.

Dengan terealisasinya seluruh target maka capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 2.4 Terlaksananya Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya layanan administrasi hukum umum lainnya pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 2 (dua) laporan dan realisasi jumlah laporan yang dihasilkan tahun 2019 sebanyak 2 (dua) laporan yaitu :

1. Sosialisasi Layanan Badan Hukum

Diselenggarakan tanggal 29 – 30 April 2019 di Hotel Aquarius Boutique Palangka Raya

2. Sosialisasi Layanan PPNS

Diselenggarakan tanggal 29 September 2019 di Hotel Luwansa Palangka Raya

Seluruh target yang ditetapkan untuk tahun 2019 dapat terealisasi, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 2.5 Terlaksananya Pemantauan dan Koordinasi

Pengukuran Kinerja :

Terlaksananya pemantauan dan koordinasi untuk tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2 (dua) laporan dan realisasi pada tahun 2019 adalah :

1. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jasa hukum yang dilaksanakan oleh Notaris di Wilayah Kalimantan Tengah
2. Telah dilaksanakan koordinasi ke instansi terkait dan koordinasi serta konsultasi ke unit pusat dalam rangka pelaksanaan tugas di wilayah

Jadi seluruh target yang ditetapkan dapat direalisasikan, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 2.6 Terlaksananya Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris ditetapkan sebanyak 1 (satu) laporan dan realisasi laporan yang dihasilkan berjumlah 1 (satu) laporan yaitu :

1. Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Notaris oleh MKN, MPW dan MPD di wilayah Kalimantan Tengah

Dengan terealisasinya target 1 (satu) laporan maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 2.7 Terlaksananya Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya publikasi layanan administrasi hukum umum tahun 2019 ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen. Realisasi dokumen yang dihasilkan berjumlah 1 (satu) dokumen, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

SASARAN 3 :

Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kalimantan Tengah yang berkualitas baik sekali

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 3 adalah Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kalimantan Tengah yang berkualitas baik sekali yang ditunjukkan dari capaian kinerja pada indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	80%	100%
2	Terlaksananya Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	80%	80%	100%
3	Terselenggaranya Inventarisasi KI Komunal	80%	80%	100%
4	Terlaksananya Pendaftaran dan Pengawasan Indikasi Geografis	80%	80%	100%
5	Terlaksananya Pencegahan pelanggaran HKI di wilayah	80%	80%	100%
6	Terlaksananya Penyelesaian pengaduan pelanggaran KI di Kanwil	80%	80%	100%

Beberapa informasi penting tentang capaian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 3.1 Persentase penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengukuran Kinerja :

Sepanjang tahun 2019 permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima adalah :

1. Hak Cipta sebanyak 38 permohonan dan diselesaikan sebanyak 38 permohonan
2. Merek sebanyak 10 permohonan dan diselesaikan sebanyak 10 permohonan.

Target yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah sebesar 80% dari seluruh permohonan yang masuk sedangkan realisasi penyelesaian penerimaan permohonan KI di Kanwil adalah 100% yaitu 48 permohonan dari 48 permohonan yang diterima.

Indikator 3.2 Terlaksananya Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya promosi dan diseminasi kekayaan intelektual tahun 2019 ditetapkan 80%. Dalam rangka merealisasikan target yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Workshop yaitu :

1. Workshop Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Maret 2019
 2. Pencegahan dan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 Mei 2019
- Dengan terlaksananya seluruh target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 3.3 Terselenggaranya Inventarisasi KI Komunal

Pengukuran Kinerja :

Target inventarisasi KI komunal tahun 2019 ditetapkan sebesar 80%.

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Workshop Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal tanggal 21 Juni 2019
2. Inventarisasi ke 3 (tiga) Kabupaten

Sesuai dengan rencana program dan kegiatan tahun 2019 maka kegiatan inventarisasi KI dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Katingan.

Dengan terealisasinya seluruh kegiatan maka capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 3.4 Terlaksananya Pendaftaran dan Pengawasan Indikasi Geografis

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya pendaftaran dan pengawasan indikasi geografis pada tahun 2019 ditetapkan 80%. Pada tahun 2019 kegiatan berupa tindak lanjut dari kegiatan tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Indikasi Geografis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian kegiatan terealisasi penuh sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 3.5 Terlaksananya Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya pencegahan pelanggaran HKI di wilayah pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 80%. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang ada di RKA-KL untuk Pegamatan Wilayah terhadap Potensi Pelanggaran KI dan realisasi pada tahun 2019 yaitu kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Barito Selatan. Dengan terealisasinya seluruh kegiatan maka capaian kinerja adalah 100%.

Indikator 3.6 Terlaksananya penyelesaian pengaduan pelanggaran KI di Kanwil

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya penyelesaian pengaduan pelanggaran KI di Kanwil pada tahun 2019 ditetapkan 80% dan realisasinya berupa pengawasan terhadap pelanggaran KI di daerah wilayah Kalimantan Tengah sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

SASARAN 4 :

Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 4 adalah fasilitas pembentukan produk hukum daerah yang ditunjukkan dari capaian kinerja pada indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%	80%	100%
2	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi Perancangan Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	100%

Indikator 4.1 Persentase (%) Rancangan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi Sesuai Permohonan

Pengukuran Kinerja :

Target persentase (%) Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan ditetapkan 80%. Pada tahun 2019 telah diterima 35 (tiga puluh lima) surat permohonan dari beberapa pemerintah daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat untuk melakukan harmonisasi sehingga menghasilkan Produk Hukum Daerah.

Adapun 35 Produk Hukum Daerah yang dihasilkan terdiri dari 24 Raperda, 10 Raperbup dan 1 Raperdes sebagai berikut :

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum	Uraian	Selesai Diharmonisasikan
1	Kabupaten Pulang Pisau	7 Raperda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2. Raperda tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Ternak Sapi 3. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 4. Raperda tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah 	<p>6 Maret 2019</p> <p>6 Maret 2019</p> <p>15 April 2019</p> <p>18 April 2019</p>

		<p>9 Raperbup</p> <p>1 Raperdes</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan 6. Raperda tentang Kabupaten Layak Anak 7. Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern 8. Raperbup tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau 9. Raperbup tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 10. Raperbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pulang Pisau 11. Raperbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan 12. Raperbup tentang Ketentuan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa 13. Raperbup tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) 14. Raperbup tentang Masterplan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 15. Raperbup tentang Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 16. Raperbup tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau 17. Raperdes Kanamit Barat Kecamatan Maliku tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 	<p>16 Mei 2019</p> <p>23 Oktober 2019</p> <p>07 November 2019</p> <p>17 Mei 2019</p> <p>23 Mei 2019</p> <p>24 Mei 2019</p> <p>13 Agustus 2019</p> <p>15 Agustus 2019</p> <p>25 September 2019</p> <p>27 September 2019</p> <p>30 September 2019</p> <p>20 November</p> <p>02 September 2019</p>
2	Kabupaten Seruyan	6 Raperda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 2. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan 	<p>22 April 2019</p> <p>24 April 2019</p> <p>17 Juli 2019</p>
3	Kabupaten Katingan	5 Raperda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Penyeng Hinje Simpei Kabupaten Katingan 2. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pembahasan 	<p>07 Mei 2019</p> <p>10 Mei 2019</p> <p>13 Mei 2019</p>

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 5. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2019-2029 	<ul style="list-style-type: none"> 15 Mei 2019 10 Juli 2019
4	Kabupaten Murung Raya	6 Raperda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa 6. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok 	<ul style="list-style-type: none"> 15 Juli 2019 18 Juli 2019 19 Juli 2019 22 Juli 2019 23 Juli 2019 31 Juli 2019
5	Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> 2 Raperda 1 Raperbup 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Raperda tentang Pembentukan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 3. Raperbup tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 	<ul style="list-style-type: none"> 20 Mei 2019 01 November 2019 08 November 2019
6	Kabupaten Kapuas	1 Raperda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Agustus 2019

Dari 35 (tiga puluh lima) permohonan yang diterima maka keseluruhannya dapat terfasilitasi yaitu 35 (tiga puluh lima) Prokumda telah selesai diharmonisasikan pada tahun 2019. Dengan demikian capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 4.2 Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Pengukuran Kinerja :

Target jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 35 orang. Pada tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah dari narasumber yang diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang Perancang yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan secara teknis serta wawasan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kualitas maupun kapasitas Perancang dalam setiap pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyusunan peraturan Perundang-undangan di daerah.

Adapun kegiatan pendalaman materi Perancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Waktu : 09.00 WIB s.d 12.00 WIB
 Narasumber : Irma Suryanti, S.E., M.Si. (DITJEN PP)
 Materi : Mekanisme Tim Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
 Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

- 2) Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
 Waktu : 13.00 WIB s.d 15.00 WIB
 Narasumber : Siti Opihah Muhapilah, S.H. (DITJEN PP)
 Materi : Evaluasi Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan
 Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

- 3) Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
 Waktu : 15.00 WIB s.d 17.00 WIB
 Narasumber : M. Manzila Falah, S.H. (DITJEN PP)

- Materi : Penyesuaian Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan
- Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
- 4) Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
- Waktu : 09.00 WIB s.d 12.00 WIB
- Narasumber : Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si. (DITJEN PP)
- Materi : Pola Karier Perancang Peraturan Perundang - undangan Pengangkatan, Penempatan, Peningkatan Kompetensi, Uji Kompetensi untuk Kenaikan Jenjang Perancang, dll Searah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
- 5) Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
- Waktu : 13.00 WIB s.d 15.00 WIB
- Narasumber : Andriana Krisnawati, S.H., M.H. (DITJEN PP)
- Materi : Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan
- Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

Dengan dilaksanakan kegiatan pendalaman materi tersebut maka jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang mendapatkan pembinaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang perancang, jadi capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.

SASARAN 5 :

5.1 Diseminasi Ham

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 5.1 Diseminasi HAM ditunjukkan dari capaian kinerja indikator berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan Diseminasi HAM Kab/Kota	1 Kabupaten	1 Kabupaten	100%

Indikator 1 Pelaksanaan Diseminasi HAM Kabupaten/Kota

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Diseminasi HAM ke Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Maret s.d.14 Maret 2019. Dengan demikian target pelaksanaan Diseminasi HAM yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) kabupaten telah terealisasi, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah 100%.

5.2 Konsultasi Teknik Pemajuan Ham Di Wilayah

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 5.2 Konsultasi teknik pemajuan HAM di wilayah ditunjukkan dari capaian kinerja indikator berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Pelaksanaan Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di Pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Indikator 1 Pelaksanaan Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di wilayah

Konsultasi teknis pemajuan HAM di wilayah dilaksanakan dalam bentuk Rapat Konsultasi Teknis Pemajuan HAM yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah

Dengan dilaksanakan rapat konsultasi teknik sebanyak 1 (satu) kegiatan maka target yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) kegiatan pelaksanaan konsultasi teknis pemajuan HAM di wilayah telah terealisasi, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 2 Pelaksanaan Konsultasi Teknis Pemajuan HAM di Pusat

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019 telah dilakukan perjalanan dinas oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Cahyani Suryandari, S.H., M.H. ke Jakarta pada tanggal 07 s.d. 08 November 2019 dalam rangka pelaksanaan konsultasi teknis ke pusat. Dengan demikian maka target yang ditetapkan untuk tahun 2019 telah terealisasi dengan capaian kinerja adalah sebesar 100%.

5.3 Telaah / Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif Ham

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 5.3 Telaah / rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM ditunjukkan dari capaian kinerja indikator berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Inventarisasi dan Identifikasi Produk Hukum Daerah (Kab/Kota)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3	Telaah dan Rekomendasi Produk Hukum Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Indikator 1 Inventarisasi dan Identifikasi Produk Hukum Daerah (Kab/Kota)

Pengukuran Kinerja :

Dalam rangka melakukan inventarisasi dan identifikasi produk hukum daerah (kabupaten/kota) maka telah dilakukan kegiatan berupa Rapat Dalam Kantor (RDK) yaitu Rapat Inventarisasi dan Identifikasi Raperda bertempat di aula Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Agustus 2019.

Dengan dilakukan 1 (satu) kegiatan rapat untuk menginventarisasi dan identifikasi produk hukum daerah maka target tahun 2019 yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan telah terealisasi, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 2 FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM

Pengukuran Kinerja :

Target FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM tahun 2019 ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan, untuk itu pada tanggal 24 Oktober 2019 telah dilaksanakan kegiatan berupa Rapat FGD untuk melakukan Evaluasi Raperda.

Dengan telah dilaksanakannya Rapat FGD (*Forum Group Discussion*) Evaluasi Raperda maka target tahun 2019 telah terealisasi, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 3 Telaah dan Rekomendasi Produk Hukum Daerah

Pengukuran Kinerja :

Target telaah dan rekomendasi produk hukum daerah untuk tahun 2019 ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan untuk mencapai target tersebut maka telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan berupa Rapat Dalam Kantor (RDK) pada tanggal 31 Agustus 2019. Jadi capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

5.4 Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 5.4 Pelayanan komunikasi masyarakat ditunjukkan dari capaian kinerja indikator berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
2	Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
3	Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Indikator 1 Penelaahan Komunikasi Masyarakat

Pengukuran Kinerja :

Sesuai dengan target penelaahan pelayanan komunikasi masyarakat yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4 (empat) kegiatan maka pada tahun 2019, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah telah dilaksanakan Kegiatan Penelaahan Pelayanan Komunikasi Masyarakat yaitu :

1. Tanggal 21 Februari di Sampit (Kotawaringin Timur)
2. Tanggal 02 Mei 2019 di Kapuas
3. Tanggal 30 Juli 2019 di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah
4. Tanggal 01 Agustus 2019 di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah

Dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar adalah 100%.

Indikator 2 Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pengukuran Kinerja :

Target koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Guna mencapai target tersebut maka sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan yaitu :

1. Tanggal 18 Juli 2019 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palangka Raya
2. Tanggal 19 Juli 2019 ke PT. Sembilan Tiga Perdana Palangka Raya
3. Tanggal 21 Mei s.d. 23 Mei 2019 ke Muara Teweh (Barito Utara)

Dengan dilaksanakan kegiatan pada tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 3 Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pengukuran Kinerja :

Untuk menghasilkan data dan informasi yang baik serta akurat maka pada tanggal 14 November 2019 disusunlah Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Dengan dilakukan penyusunan laporan ini maka target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kegiatan terealisasi, jadi capaian kinerja adalah 100%.

5.5 Aksi Ham Pemerintah Daerah

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 5.5 Aksi HAM pemerintah daerah ditunjukkan dari capaian kinerja indikator berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Indikator 1 Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Pengukuran Kinerja :

Dalam rangka melakukan evaluasi dan persiapan pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM, maka pada tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaporan pada tanggal 23 April 2019 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Dengan demikian realisasi telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) kegiatan, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Indikator 2 Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan koordinasi pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM di daerah pada tahun 2019 dilaksanakan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Juni s.d. 14 Juni 2019. Target koordinasi pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan untuk tahun 2019 dan dengan dilaksanakan koordinasi ke Pemda Kab. Kapuas maka target dapat direalisasikan, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 3 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja :

Target koordinasi dengan pemerintah daerah tahun 2019 adalah 1 (satu) kegiatan. Pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu dengan instansi :

1. Bappeda provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Septemberr 2019
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah tanggal 12 September 2019

Dengan telah dilakukan kegiatan koordinasi pada tahun 2019 maka target yang telah ditetapkan tercapai dengan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

5.6 Kabupaten / Kota Peduli Ham

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 5.6 Kabupaten / kota peduli HAM ditunjukkan dari capaian kinerja indikator berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Evaluasi dan persiapan penyampaian Data Kabupaten / Kota Peduli HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Rapat Koordinasi Kabupaten / Kota peduli HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3	Pemeriksaan data Usulan Kriteria Kabupaten / Kota Peduli HAM	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
4	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

Indikator 1 Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kab/Kota Peduli HAM

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan evaluasi dan persiapan penyampaian data kabupaten/kota peduli HAM dilaksanakan dalam bentuk Rapat di Aula kecil Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Agustus 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh instansi

Tingkat I provinsi Kalimantan Tengah yang terkait seperti : Biro Hukum, Bappeda, Dukcapil, BKKBN, Dinas Tenaga Kerja, Badan Statistik, Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, serta Kementerian Agama. Target yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah 1 (satu) kegiatan, dan dengan telah diselenggarakan Rapat evaluasi dan persiapan penyampaian data kab/kota peduli HAM maka capaian kinerja tercapai sebesar 100%

Indikator 2 Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM

Pengukuran Kinerja :

Rapat koordinasi kabupaten/kota peduli HAM dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Agustus 2019 dihadiri peserta yang telah terlibat sebelumnya pada Rapat persiapan data kab/kota peduli HAM tanggal 28 Agustus 2019. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah (Cahyani Suryandari, S.H., M.H.) dan Kepala Bidang HAM (Karyadi, S.H., M.H.).

Dengan terlaksananya Rapat Koordinasi ini, maka target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan tercapai sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Indikator 3 Pemeriksaan Data Usulan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan pemeriksaan data usulan kriteria kab/kota peduli HAM dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 02, 04, 06 dan 10 September 2019.

Target yang ditetapkan adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan pemeriksaan, sehingga capaian kinerja diperoleh untuk tahun 2019 sebesar 100%.

Indikator 4 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah dilaksanakan ke :

1. Pemerintah daerah Kotawaringin Timur (Sampit) tanggal 19 Juni s.d. 21 Juni 2019

2. Pemerintah daerah Barito Selatan (Buntok) tanggal 24 Juli s.d. 26 Juli 2019

Koordinasi ini bertujuan untuk penyampaian pengisian data kabupaten/kota peduli HAM tahun 2019. Target yang telah ditetapkan untuk 2019 adalah 2 (dua) kegiatan, sehingga dengan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan ke Pemda Kotim dan Barsel maka capain kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%

SASARAN 6 :

Terselenggaranya Pembinaan Dan Pembangunan Hukum Di Tingkat Daerah Didukung Perencanaan Hukum Di Tingkat Daerah, Analisis Dan Evaluasi Hukum Di Daerah, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Terselenggaranya Bantuan Hukum Serta Tersedianya Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum
Pengukuran Kinerja :

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 6 ditunjukkan dari capaian kinerja pada indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	82 Kasus	108 kasus	131,71 %
2	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %
3	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayah	1 Daerah	1 Daerah	100 %
4	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Daerah	1 Daerah	100 %
5	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah	1 Daerah	100 %
6	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Daerah	1 Daerah	100 %
6	Pelantikan / Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Peserta	50 Peserta	100 %

Indikator 6.1 Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah berupa Tahap Pemberian Bantuan Hukum dari Penuntutan, Persidangan / Lanjutan sampai dengan Putusan Tingkat Pertama (Inkracht) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang melaksanakan Program Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 berjumlah 6 (enam) OBH yaitu :

1. Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya
2. Perkumpulan Eka Hapakat Sampit

3. Perkumpulan Konsultasi Bantuan Hukum STIH Habaring Hurung Sampit
4. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit Buntok
5. DPC PERADI Cabang Palangka Raya
6. LBH Mustika Bangsa Kapuas

Target jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 82 kasus, sedangkan realisasi yang memperoleh bantuan hukum litigasi adalah sebanyak 108 kasus. Hal ini disebabkan Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 131,71 %.

Indikator 6.2 Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok masyarakat miskin di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) adalah berupa :

1. Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya
Jenis kegiatan berupa Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Konsultasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Investigasi Perkara.
2. PLBH Barito Terbit Buntok
Jenis Kegiatan berupa Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum dan Drafting Dokumen
3. DPC PERADI Cabang Palangka Raya
Jenis Kegiatan berupa Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian Hukum dan Konsultasi Hukum
4. LBH Mustika Bangsa Kapuas
Jenis Kegiatan berupa Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum, Mediasi, Konsultasi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dari 7 (tujuh) kegiatan bantuan hukum non litigasi yang menjadi target tahun 2019 seluruhnya dapat direalisasikan, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100 %.

Indikator 6.3 Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah pada tahun 2019 dilakukan di 1 (satu) daerah terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu :

1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah yang dilaksanakan :
 - a. Tanggal 16 Agustus s.d. 18 Agustus 2019 ke Perkumpulan Eka Hapakat Sampit dan PKBH STIH Habaring Hurung Sampit ;
 - b. Tanggal. 24 Oktober s.d. 26 Oktober 2019 Kegiatan Wawancara dengan Penerima Bantuan Hukum di Lapas Sampit.

2. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilaksanakan :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Peserta : 30 (tiga puluh) orang

Materi : UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan topik Kewenangan Kemenkumham RI Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum, Layanan Bantuan Hukum, dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Tidak Mampu.

Narasumber : 1. Drs. Juliasman Purba, M.Si (Kakanwil Kemenkumham Kalteng)
2. Cahyani Suryandari, S.H., M.H. (Kadiv Yankumham Kalteng)
3. Henry S. Dalim, S.H., M.H. (Ketua DPC PERADI Cabang Palangka Raya)

Tempat : Aula Hotel Nascar Palangka Raya

Dengan terlaksananya kegiatan pengawasan pemberian bantuan hukum di wilayah pada 1 (satu) daerah/wilayah maka target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 terealisasi sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

Indikator 6.4 Jumlah penyuluhan hukum di daerah

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019, dalam rangka penyebaran informasi hukum kepada masyarakat yaitu melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan target 1 (satu) daerah/Kanwil yang meliputi kegiatan antara lain :

1. Melaksanakan Ceramah Penyuluhan Hukum sebanyak 2 (dua) Kegiatan :
 - a. Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2019
 - Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai

- Narasumber : 1. Cahyani Suryandari, S.H., M.H (Kadiv Yankumham)
2. Kristian (Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)
- Materi : UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Tempat : Aula Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- b. Hari/Tanggal : Jum'at, 26 April 2019
- Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
- Narasumber : 1. Drs. Juliasman Purba, M.Si. (Kakanwil Kemenkumham Kalteng)
2. Kartika Candrasari, SH., MH (Sekretaris pada DPC PERADI Cabang Palangka Raya)
- Materi : UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Tempat : Aula Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Melakukan Pembinaan/Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Peresmian Desa/Kelurahan dan Sekolah sadar Hukum dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :
- a. Melaksanakan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi
- Kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi dilaksanakan pada :
- Hari/tanggal : Kamis, 26 September 2019
- Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Aula Kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya
- Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Tahun 2019 berasal dari perwakilan Kelompok Kadarkum dari 14 (empat belas) Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah dari kalangan Pelajar SLTA sederajat dengan masing-masing regu berjumlah 5 (lima) orang.
- b. Melaksanakan Evaluasi/Pembinaan Kelompok Kadarkum / Desa / Kelurahan / Sekolah Sadar Hukum.
- Kegiatan Evaluasi / Pembinaan Kelompok Kadarkum / Desa / Kelurahan / Sekolah Sadar Hukum dilaksanakan pada :
- Hari/tanggal : Senin, 16 September 2019
- Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Aula Eks Kantor Bupati Pulang Pisau
- Peserta : 20 (dua puluh) Orang

Materi : Pemantapan materi Lomba Kadarkum Tahun 2019 bagi Kelompok Kadarkum yang akan mewakili Kabupaten Pulang Pisau pada Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Tahun 2019 yang terdiri dari 6 (enam) Undang-undang antara lain :

- UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU sebagaimana telah diubah dg UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

c. Melaksanakan Peresmian Desa/Kelurahan/Sekolah Sadar Hukum Koordinasi dalam rangka persiapan Peresmian Desa / Kelurahan / dilaksanakan sebagai berikut :

- Tanggal 23 s.d. 25 Mei 2019 ke Kabupaten Gunung Mas ;
- Tanggal 07 s.d. 09 Agustus 2019 ke Kabupaten Gunung Mas ;
- Tanggal 09 s.d. 11 September 2019 ke Kabupaten Barito Selatan ;
- Tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2019 ke Kabupaten Kotawaringin Timur.

d. Melaksanakan Sosialisasi Penetapan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum.

Kegiatan Sosialisasi Penetapan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2019

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Peserta : 30 (tiga puluh) orang

- Materi : Pedoman dan Tata Cara Penetapan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar.
- Narasumber : 1. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd (Kakanwil Kemenkumham Kalteng)
2. Eko Suparmiyati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya)
- Tempat : Aula Hotel Luwansa Palangka Raya

Indikator 6.5 Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah

Pengukuran Kinerja :

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah adalah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yaitu antara lain membantu dalam penyusunan Naskah Akademik dari Pemerintah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	NASKAH AKADEMIK
1	Pulang Pisau	1. Tentang Pembentukan Hukum Daerah 2. Tentang Kabupaten Layak Anak 3. Tentang Pengelolaan Pasar 4. Tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern
2	Barito Selatan	1. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
3	Kotawaringin Timur	1. Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4	Seruyan	1. Tentang Penyelenggaraan Kearsipandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
5	Provinsi Kalimantan Tengah	1. Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan terselenggaranya kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah selama tahun 2019 di daerah Kalimantan Tengah, maka target yang ditetapkan 1 (satu) daerah tercapai sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%

Indikator 6.6 Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan target capaian untuk 1 (satu) daerah Kanwil melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyusunan Database Peraturan Perundang-Undangan ini dilaksanakan berupa kegiatan rapat-rapat serta koordinasi ke beberapa Instansi terkait yaitu Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Palangka Raya, Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan JDIH/Perpustakaan Hukum.
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan JDIH / Perpustakaan Hukum dilaksanakan yaitu :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat (BPHN di Jakarta) pada tanggal :
 - Tanggal 26 s.d. 28 Februari 2019
 - Tanggal 24 s.d. 26 Maret 2019
 - Tanggal 09 s.d. 11 September 2019
 - b. Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten dilaksanakan oleh @ 3 (tiga) orang
 - Tanggal 25 s.d. 27 Maret ke Kabupaten Barito Selatan ;
 - Tanggal 25 s.d. 27 Maret ke Kabupaten Barito Timur ;
 - Tanggal 29 April s.d. 01 Mei 2019 ke Kabupaten Kapuas ;
 - Tanggal 19 s.d. 21 Juni 2019 ke Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - Tanggal 19 s.d. 21 Juni 2019 ke Kabupaten Seruyan.

Dengan telah dilaksanakannya seluruh kegiatan dalam 1 (satu) daerah/wilayah di Kalimantan Tengah dalam rangka terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDihn maka target yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) daerah telah terealisasi, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 6.7 Pelatihan / Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019 Kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan target capaian untuk 50 (lima puluh) orang peserta melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Persiapan dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik). Kegiatan ini dilaksanakan berupa kegiatan rapat-rapat persiapan serta Koordinasi ke Instansi terkait (Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah) dan ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ;

2. Menyelenggarakan Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik) yang dilaksanakan pada :

- Hari/tanggal : Senin, 22 April 2019
- Waktu : 08.30 WIB s.d Selesai
- Peserta : 50 (lima puluh) orang
- Narasumber : 1. Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H
(Kapus Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN)
2. Constantinus Kristomo, S.S., M.H.
(Kabid Bantuan Hukum BPHN)
3. Drs. Juliasman Purba, M.Si.
(Kakanwil Kemenkumham Kalteng)
- Materi : - Layanan Bantuan Hukum
(UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)
- Perluasan Bantuan Hukum Melalui Peningkatan Kualitas OBH dan Paralegal
- Tempat : Aula Hotel Batu Suli Internasional Palangka raya.

Dengan terlaksananya kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (tematik) yang diikuti oleh 50 peserta maka target tahun 2019 yang ditetapkan untuk melakukan peningkatan kapasitas 50 orang OBH dan Paralegal telah terealisasi, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%.

SASARAN 7 :

Melaksanakan Pengkajian HAM di Wilayah

Melaksanakan Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan HAM di Wilayah

Pengukuran Kinerja :

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 7 ditunjukkan dari capaian kinerja pada indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kajian Hak Asasi Manusia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
2	Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

Indikator 7.1 Kajian Hak Asasi Manusia

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019 dilaksanakan 3 (tiga) kali tahapan rapat dalam rangka kegiatan kajian hak asasi manusia, yaitu :

1. Rapat Pengolahan Data
2. Rapat Presentasi Proposal
3. Rapat Presentasi Hasil Kajian

Dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 dengan mengundang peserta dari pegawai Lapas Palangka Raya dan Rutan Palangka Raya serta narasumber dari STAIN Palangka Raya.

Dengan terlaksananya kegiatan Rapat Kajian Hak Asasi Manusia maka target 1 (satu) kegiatan yang telah ditetapkan terealisasi, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Indikator 7.2 Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi mengenai Hasil Penelitian Balitbangham pada tanggal 15 April 2019 bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan mengundang Akademik Universitas Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah, STAIN dan tokoh masyarakat/Damang Adat, dinas instansi dan stakeholder lainnya.

Target yang ditetapkan untuk 2019 adalah 1 (satu) kegiatan, dengan terlaksananya 1 (satu) kegiatan sosialisasi ini maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

SASARAN 8 :

TERSELENGGARANYA PEMASYARAKATAN DI WILAYAH

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 8 adalah terselenggaranya pemasyarakatan di wilayah yang ditunjukkan dari capaian kinerja pada indikator di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	10 Bulan	10 Bulan	100%
2	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
3	Pemberian Remisi	1 Tahun	1 Tahun	100%
4	Pameran	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
5	Koordinasi Dilkumjakpol	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
6	Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

7	Konsultasi Teknis Pedoman dan Indikator Penilaian Pelaksanaan Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
8	Konsultasi Teknis Intelijen Masyarakat dan Standar Operasional Prosedur Pengamanan pada Lapas maksimum, medium dan minimum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
9	Koordinasi Teknis Masyarakat di Bidang Pembinaan, Bimbingan Masyarakat, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	3 Kali	5 Kali	166,67%
10	Koordinasi Teknis Masyarakat di Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	3 Kali	2 Kali	66,67 %
11	Pencegahan dan Penindakan Kamtibmas berupa Pelaksanaan Razia dan Tes Urine bagi Pegawai dan Warga Binaan Masyarakat	7 Kali	11	157,14%
12	Mutasi/Pemindahan Narapidana	1 Paket	1 Paket	100 %
13	Monitoring dan Evaluasi UPT Masyarakat	6 Kali	8 Kali	133,33%

Indikator 8.1 Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Pengukuran Kinerja :

Pelaksanaan pelatihan beladiri Yongmodo yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 bekerja sama dengan Korem 102 Panju Panjung Palangka Raya dan latihan Yongmodo bertempat di lapangan Korem 102 Panju Panjung Palangka Raya.

Pembinaan satuan tugas keamanan dan ketertiban pada tahun 2019 dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober . Dengan demikian maka target capaian kinerja tahun 2019 tercapai sebesar 100 %.

Indikator 8.2 Sidang Tim Pengamat Masyarakat

Pengukuran Kinerja :

Target sidang Tim Pengamat Masyarakat tahun 2019 ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan. Adapun pelaksanaan sidang Tim Pengamat Masyarakat di Kantor Wilayah sepanjang tahun 2019 yang membahas mengenai pemberian hak-hak Warga Binaan Masyarakat (PB, CB, CMB, Asimilasi) maupun terkait

pemindahan/mutasi narapidana baik antar Lapas/Rutan se-Kalimantan Tengah ataupun antar provinsi dengan data sebagai berikut :

NO	SIDANG TPP	TANGGAL PELAKSANAAN	AGENDA SIDANG TPP
1	I	22 Januari 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
2	II	12 Maret 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
3	III	22 Maret 2019	Permohonan Persetujuan Narapidana yang akan mengikuti Kegiatan Pameran Produk Unggulan Narapidana di Jakarta
4	IV	04 April 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
5	V	18 Juni 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
6	VI	01 Agustus 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
7	VII	08 November 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
8	VIII	11 November 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
9	IX	12 November 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
10	X	13 November 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
11	XI	14 November 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
12	XII	22 November 2019	Usulan Pemindahan Penahanan untuk menjalani proses Hukum di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
13	XIII	02 Desember 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
14	XIV	06 Desember 2019	Permohonan Persetujuan Narapidana Mengikuti Kegiatan Pertandingan Futsal Gubernur Cup 2019
15	XV	09 Desember 2019	Pembahasan Crash Program Pelaksanaan Usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas(CMB) dan Asimilasi
16	XVI	09 Desember 2019	Usul Pembebasan Bersyarat (PB) Melalui Crash Program
17	XVII	10 Desember 2019	Usul Permohonan Ijin Keluar Sementara Narapidana sebagai Teknisi /Operator Sound System dan Tim Musik dalam kegiatan ibadah dan perayaan natal Persekutuan Umat Kristiani Keluarga Besar Pengayoman Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah
18	XVIII	18 Desember 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
19	XIX	19 Desember 2019	Usulan Pemindahan Narapidana
20	XX	20 Desember 2019	Usulan Pemberian Crash Program PB, CB, CMB dan Asimilasi

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

Indikator 8.3 Pemberian Remisi

Pengukuran Kinerja :

Target Pemberian remisi yang ditetapkan adalah 1 (satu) tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Tim Pemberian Remisi telah melaksanakan Pemeriksaan dan Verifikasi pemberian remisi bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif . Adapun remisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

NO	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	05 Februari 2019	Remisi Hari Raya Imlek
2	07 Maret 2019	Remisi Hari Raya Nyepi
3	07 April 2019	Remisi Hari Kesehatan Dunia
4	19 Mei 2019	Remisi Hari Raya Waisak
5	05 Juni 2019	Remisi Hari Raya Idul Fitri
6	23 Juli 2019	Remisi Hari Anak Nasional
7	17 Agustus 2019	Remisi Hari Kemerdekaan RI
8	25 Desember 2019	Remisi Hari Raya Natal

Dengan telah dilaksanakan pemberian remisi tahun 2019 maka target telah direalisasikan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%

Indikator 8.4 Pameran

Pengukuran Kinerja :

Dalam rangka pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan, serta salah satu upaya untuk memperkenalkan, promosi dan memasarkan hasil karya narapidana kepada masyarakat maka dilakukan dengan mengikuti kegiatan pameran hasil karya narapidana.

Adapun pameran yang diikuti pada tahun 2019 adalah :

1. Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) 2019 dan Lomba Produk Souvenir Hotel dilaksanakan di Jakarta tanggal 24 Maret s.d. 29 Maret 2019
2. Pameran Kalteng Quality Expo di Palangka Raya tanggal 29 April s.d. 03 Mei 2019.

Indikator 8.5 Koordinasi Dilkumjakpol

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan koordinasi Dilkumjakpol pada tahun 2019 dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pada tanggal 25 Juni 2019 yang bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari :

1. Pejabat struktural divisi pemasyarakatan Kanwil Kalteng
2. Kepala UPT pemasyarakatan se Kalteng
3. Pengadilan Tinggi Kalteng
4. Kejaksaan Tinggi Kalteng
5. Kepolisian Daerah Kalteng
6. Pengadilan Negeri se Kalteng
7. Kejaksaan Negeri se Kalteng
8. Polres se Kalteng.

Target koordinasi Dilkumjapol yang ditetapkan sebesar 1 (satu) kegiatan, dengan diadakan kegiatan Dilkumjapol maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 8.6 Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di wilayah

Pengukuran Kinerja :

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah telah melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan tingkat wilayah dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan tugas fungsi Divisi dan UPT Pemasyarakatan selama tahun 2018 dan merancang program dan rencana kerja serta kalender kerja untuk tahun anggaran 2019. Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni s.d. 27 Juni 2019 yang bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya.

Kegiatan Rakernispas diikuti oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Pejabat Struktural baik di Divisi maupun UPT Pemasyarakatan se Kalimantan Tengah, dengan narasumber Direktur Keamanan dan Ketertiban serta Direktur Perawatan dan tahanan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Target ditetapkan sebesar 1 (satu) kegiatan dan dengan penyelenggaraan rapat kerja teknis pemasyarakatan di wilayah ini maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 8.7 Konsultasi Teknis Pedoman dan Indikator Penilaian Pelaksanaan Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan konsultasi teknis pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pada tanggal 21 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, diikuti oleh seluruh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dan Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Lapas dan Rutan se Palangka Raya. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Kantor Wilayah (Drs. Juliasman Purba, M.Si), Kepala Divisi Administrasi (Sucipto, S.H., M.H., M.Kn.) dan Kepala Divisi Yankuham (Cahyani Suryandari, S.H., M.H.) Dengan terlaksananya kegiatan konsultasi teknis ini maka target yang ditetapkan sebesar 1 (satu) kegiatan terealisasi, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 8.8 Konsultasi Teknis Intelijen Pemasarakatan dan Standar Operasional Prosedur Pengamanan pada Lapas maksimum, medium dan minimum

Pengukuran Kinerja :

Kegiatan konsultasi teknis intelejen pemasarakatan dan standar operasional prosedur pengamanan pada Lapas maksimum, medium dan minimum diselenggarakan di Hotel Fovere Palangka Raya pada tanggal 26 Maret s.d. 27 Maret 2019 dengan peserta adalah Kepala UPT Lapas dan Rutan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dan Kepala Pengamanan Rutan (KPR) se Kalimantan Tengah, dan bertindak narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas SOP pengamanan yang melekat pada Lembaga Pemasarakatan dengan *high risk*, *medium risk* dan *minimum risk*.

Indikator 8.9 Koordinasi Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi

Pengukuran Kinerja :

Dalam rangka melaksanakan koordinasi teknis pemasarakatan di bidang pembinaan, bimbingan pemasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, maka kegiatan dilaksanakan dengan menghadiri rapat di pusat maupun kegiatan koordinasi dengan unit eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Jakarta, yaitu :

1. Rapat Teknis Pemasarakatan di Jakarta tanggal 22 April s.d. 24 April 2019

2. Rapat Optimalisasi Tusi Pemasarakatan di Jakarta tanggal 20 Mei s.d. 22 Mei 2019
3. Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham di Jakarta tanggal 01 Juli s.d. 03 Juli 2019
4. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Pengendalian Pemerintah Daerah dalam rangka Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah Indonesia Tengah tanggal 07 s.d. 09 Agustus 2019
5. Koordinasi Kepala Divisi Pemasarakatan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Jakarta tanggal 18 s.d. 20 November 2019

Target dilaksanakan koordinasi teknis pemsarakatan di bidang pembinaan, bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan realisasi pelaksanaan koordinasi sepanjang tahun 2019 adalah 5 (lima) kali. Jika dibandingkan realisasi dengan target maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 166,67%.

Indikator 8.10 Koordinasi Teknis Pemsarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Pengukuran Kinerja :

Koordinasi teknis pemsarakatan di bidang keamanan, kesehatan dan perawatan narapidana/tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sepanjang tahun 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan yaitu :

1. Rapat koordinasi di Ditjenpas tanggal mengenai penanganan narapidana/tahanan kasus narkotika di dalam Lapas/Rutan pada tanggal 22 s.d. 24 Januari 2019
2. Supervisi dan reuiu di Jakarta tanggal 18 s.d. 26 September 2019.

Target yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan realisasi kegiatan hanya 2 (dua) kali. Realisasi dibandingkan dengan target maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 66,67%

Indikator 8.11 Pencegahan dan Penindakan Kamtib berupa Pelaksanaan Razia dan Tes Urine bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemsarakatan

Pengukuran Kinerja :

Dalam rangka mewujudkan Lapas dan Rutan yang bebas dari HP, pungli dan narkoba, sepanjang tahun 2019 Satgas Kamtib Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kalimantan Tengah telah melaksanakan razia dan pengeledahan kamar hunian dan tes urine bagi seluruh Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan data sebagai berikut :

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	URAIAN KEGIATAN
1	06 Februari 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Lapas Kelas IIA Palangka Raya
2	13 Februari 2019	Test Urine Petugas di Lapas Kelas IIA Palangka Raya
3	01 Maret 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya
4	09 April 2019 10 April 2019	Test Urine Bagi Petugas dan WBP di Lapas Kelas IIB Sampit Razia blok kamar hunian WBP di Lapas Kelas IIB Sampit
5	26 Juli 2019 27 Juli 2019	Test Urine Petugas di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Razia blok kamar hunian WBP di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas
6	22 Agustus 2019 23 Agustus 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Lapas Kelas IIB Muara Teweh Test Urine bagi Petugas dan WBP di Lapas Kelas IIB Muara Teweh
7	29 Agustus 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang
8	18 September 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun
9	17 Oktober 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Rutan Kelas IIB Buntok
10	08 November 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya
11	13 Desember 2019	Razia blok kamar hunian WBP di Rutan Kelas IIA Palangka Raya

Target yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah sebanyak 7 (tiga) kali sedangkan realisasi kegiatan 11 (sebelas) kali. Realisasi dibandingkan dengan target maka capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 157,14%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja hanya untuk UPT luar kota Palangka Raya, sementara dalam pelaksanaannya kegiatan dilakukan juga untuk UPT dalam kota Palangka Raya.

Indikator 8.12 Mutasi / Pemindahan Narapidana

Pengukuran Kinerja :

Pada tahun 2019 Divisi Pemasyarakatan telah melaksanakan pemindahan/mutasi narapidana baik antar Lapas dan Rutan di Kalimantan Tengah maupun antar provinsi. Target mutasi/pemindahan narapidana untuk tahun 2019 adalah 1 (satu) paket digunakan untuk kegiatan pemindahan narapidana antar pulau yaitu memindahkan 2 (dua) orang narapidana high risk dari Lapas kelas IIA Palangka raya ke Lapas Khusus kelas I Karang Anyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

Dengan telah dilaksanakan pemindahan narapidana ke luar daerah Kalimantan Tengah ini maka target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) paket telah terealisasi, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Indikator 8.13 Monitoring dan Evaluasi UPT Pemasyarakatan

Pengukuran Kinerja :

Sepanjang tahun 2019, Divisi Pemasyarakatan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja UPT Pemasyarakatan se Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan UPT Pemasyarakatan yang berpredikat WBK dan WBBM, dengan data sebagai berikut :

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI MONEV
1	07 s.d. 09 Januari 2019	Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun
2	09 s.d. 11 April 2019	Lapas Kelas IIB Sampit
3	19 s.d. 20 Maret 2019	Lapas Kelas IIA Palangka Raya Rutan Kelas IIA Palangka Raya.
4	12 s.d. 14 Juni 2019	Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun
5	17 s.d. 18 September	Lapas Kelas IIB Sampit
6	03 Desember 2019	LPKA Kelas II Palangka Raya
7	03 Desember 2019	LPP Kelas I Palangka Raya
8	19 Desember 2019	Rutan Kelas IIA Palangka Raya

Target monitoring dan evaluasi yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah sebanyak 6 (enam) kali sedangkan sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan 8 (delapan) kali

kegiatan monitoring dan evaluasi UPT Pemasarakatan di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian maka capaian kinerja untuk tahun 2019 diperoleh sebesar 133,33%.

SASARAN 9 :

Terselenggaranya Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 9 adalah Terselenggaranya Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan	288 LHK	423 LHK	146,87 %
2	Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang dilaksanakan sesuai ketentuan dari Permohonan yang masuk	672 Dokumen	1503 Dokumen	223,66 %
3	Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	8780 Dokumen	13311 Dokumen	151,60 %
4	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	8 Layanan	8 Layanan	100 %
5	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	94 Orang	122 Orang	129,78 %
6	Jumlah Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan	5 LHK	3 LHK	60 %
7	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	200 Pemeriksaan	353 Pemeriksaan	176,5 %
8	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya	2 Layanan	2 Layanan	100 %
9	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100 %
10	Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100 %

Beberapa informasi penting tentang capaian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 9.1 Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan

Pengukuran Kinerja :

Pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah meliputi 13 Kabupaten 1 Kota dilaksanakan oleh

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya
dengan wilayah kerja 7 Kabupaten 1 Kota sebanyak 338 kegiatan ;
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit
dengan wilayah kerja 6 Kabupaten sebanyak 85 kegiatan.

Target Jumlah Pengawasan Keimigrasian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 288 LHK dan realisasi sebanyak 423 LHK sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 146,87 %. Capaian Kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.

Indikator 9.2 Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang dilaksanakan sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk

Pengukuran Kinerja :

Penerbitan dokumen keimigrasian Bagi Orang Asing yang dilaksanakan sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk meliputi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebanyak 709 Dokumen
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit sebanyak 794 Dokumen.

Capaian kinerja melebihi atau sebesar dua kali target awal hal ini sejalan dengan banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah dengan keperluan seperti wisata, keagamaan, bekerja (TKA) dan kegiatan lainnya.

Target Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang dilaksanakan sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 672 Dokumen dan realisasi sebanyak 1503 Dokumen sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 223,66 %.

Indikator 9.3 Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk

Pengukuran Kinerja :

Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang dilaksanakan sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk meliputi penerbitan paspor dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebanyak 7722 Dokumen
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit sebanyak 5589 Dokumen.

Capaian kinerja melebihi target awal hal ini sejalan dengan banyaknya WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan keperluan seperti wisata, keagamaan, bekerja (TKI) dan kegiatan lainnya.

Target Jumlah Penertiban Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 8780 Dokumen dan realisasi sebanyak 13311 Dokumen sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 151,60 %.

Indikator 9.4 Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Pengukuran Kinerja :

Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian telah dilaksanakan sesuai dengan target dan anggaran pada DIPA dengan rincian :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebanyak 4 (empat) Layanan
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit sebanyak 4 (empat) Layanan.

Target Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) Layanan dan realisasi sebanyak 8 (delapan) Layanan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100 %.

Indikator 9.5 Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan

Pengukuran Kinerja :

Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian yang merupakan salah satu fungsi Penegakkan Hukum Keimigrasian dengan capaian kinerja di wilayah Kalimantan Tengah melebihi target sesuai kinerja yang meliputi :

a. Pembatalan Izin Tinggal	12 (dua belas) LHK
b. Pendetensian	26 (dua puluh enam) LHK
c. Penangkalan	22 (dua puluh dua) LHK
d. Deportasi	24 (dua puluh empat) LHK
e. Overstay	<u>38 (tiga puluh delapan) LHK</u>
JUMLAH	122 (seratus dua puluh dua) LHK

Untuk Penegakan Hukum dapat dibagi menurut daerah kerja yaitu :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebanyak 85 (delapan puluh lima) LHK
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) LHK.

Target Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Orang, sedangkan realisasi sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) Orang sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 129,78 %.

Indikator 9.6 Jumlah Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan

Pengukuran Kinerja :

Target Jumlah Penyidikan Keimigrasian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) LHK dan realisasi sebanyak 3 (tiga) LHK sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 60 %.

Capaian kinerja sebesar 60% (tidak mencapai target) dengan penjelasan bahwa Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan berdasarkan adanya pelanggaran keimigrasian dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana, Penyidikan Keimigrasian berupa Pro Justitia dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit P21 tanggal 18 Mei 2019 kepada 3 (tiga) orang Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan pelanggaran pasal 116 jo 71 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Indikator 9.7 Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

Pengukuran Kinerja :

Target Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 200 Pemeriksaan dan realisasi sebanyak 353 Pemeriksaan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 176,5 %.

Pemeriksaan Keimigrasian hanya menjadi tuis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit telah melebihi target sesuai dengan pemeriksaan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar di wilayah kerja Kanim Sampit.

Indikator 9.8 Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya

Pengukuran Kinerja :

Target Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) Layanan. Realisasi sebanyak 2 (dua) Layanan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100 %.

Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya telah terlaksana sesuai target dengan rincian :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya 1 (satu) Layanan dengan realisasi Rp. 806.610.999,-
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit 1 (satu) Layanan dengan realisasi Rp. 233.120.000,-

Indikator 9.9 Jumlah Layanan Perkantoran

Pengukuran Kinerja :

Target Jumlah Layanan Perkantoran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 2 Layanan dan realisasi sebanyak 2 Layanan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah 100 %.

Layanan Perkantoran telah terlaksana dengan rincian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya 1 Layanan dengan realisasi Rp. 3.504.546.691,- sedangkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit 1 Layanan dengan realisasi Rp. 2.943.129.000,-

Indikator 9.10 Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pengukuran Kinerja :

Target terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) Layanan dan realisasi sebanyak 1 (satu) Layanan sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100 %.

Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya 1 Layanan dengan realisasi Rp. 2.024.767.703,-

3.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Selain dilihat dari pengukuran kinerja melalui pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Jika pengukuran capaian kinerja organisasi diukur dari capaian kinerja sasaran yang dilihat dari perbandingan realisasi kegiatan berbanding dengan target tiap indikator kerja/kegiatan yang telah ditetapkan, maka pencapaian kinerja keuangan dapat terlihat dari realisasi belanja berbanding dengan pagu anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran atau disebut Realisasi Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan jenis belanja maka realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Belanja 31 Desember 2019

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	54.237.813.000	56.690.347.374	104,52
Belanja Barang	56.121.892.000	54.918.262.137	97,86
Belanja Modal	2.057.628.000	2.024.767.703	98,4
Jumlah	112.417.333.000	113.633.377.214	100,75

Dilihat dari tabel di atas, Realisasi penyerapan anggaran untuk tahun 2019 adalah sebesar 100,75%. Angka realisasi ini belum menunjukkan angka sebenarnya karena pada realisasi belanja pegawai terdapat pagu minus, sedangkan untuk pencapaian realisasi belanja barang dan modal telah menunjukkan indikator pelaksanaan kinerja yang sangat baik, yaitu masing-masing untuk belanja barang dapat direalisasikan sebesar 97,86 % dari pagu anggaran dan untuk belanja modal dapat terealisasikan sebesar 98,4% dari pagu anggaran.

Jika diasumsikan pagu minus belanja pegawai telah direvisi maka dapat dipastikan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan mencapai angka penyerapan di atas 99%.

Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa untuk pencapaian kinerja dilihat dari akuntabilitas keuangannya, maka Kantor Wilayah telah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk Tahun 2019.

3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

Berdasarkan wilayah kerjanya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memiliki 27 (dua puluh tujuh) DIPA yang terinci sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) DIPA di Kantor Wilayah ;
2. 16 (enam belas) DIPA UPT Pemasarakatan;
3. 2 (dua) DIPA UPT Keimigrasian.

**Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
berdasarkan DIPA/Satuan Kerja
per 31 Desember 2019**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran	Rincian Pagu			Jumlah Realisasi	
				Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Realisasi	%
1	409190	Kanwil (Sekretariat Jenderal)	10.572.367.000	7.400.403.000	3.171.964.000	-	10.534.856.406	99,65%
2	409191	Kanwil (Dijjen AHU)	1.900.000.000		1.900.000.000	-	1.861.551.977	97,98%
3	409192	Kanwil (Dijjen PAS)	624.138.000	-	624.138.000	-	621.397.148	99,56%
4	409193	Kanwil (Dijjen Imigrasi)	578.000.000	-	578.000.000	-	576.711.566	99,78%
5	409194	Kanwil (Dijjen HKI)	153.729.000	-	153.729.000	-	152.292.780	99,07%
6	409195	Kanwil (Dijjen PP)	205.000.000	-	205.000.000	-	203.021.948	99,04%
7	409196	Kanwil (Dijjen HAM)	224.515.000	-	224.515.000	-	216.143.400	96,27%
8	409197	Kanwil (BPHN)	879.402.000	-	879.402.000	-	878.498.791	99,90%
9	409198	Kanwil (BalitbangHAM)	42.221.000	-	42.221.000	-	40.865.000	96,79%
10	406689	Lapas Palangka Raya	11.835.251.000	5.549.606.000	6.285.645.000	-	12.119.041.699	102,40%
11	406709	Lapas Muara Teweh	6.089.647.000	2.956.651.000	3.132.996.000	-	6.111.314.490	100,36%
12	406715	Lapas Pangkalan Bun	9.226.062.000	3.747.427.000	5.478.635.000	-	9.451.945.960	102,45%
13	406721	Lapas Sampit	10.137.646.000	4.265.479.000	5.872.167.000	-	10.301.666.313	101,62%
14	683699	LPKN Kasongan	5.784.433.000	2.488.306.000	3.296.127.000	-	5.637.847.913	97,47%
15	621819	Rutan Palangka Raya	9.722.180.000	4.268.645.000	5.453.535.000	-	9.816.484.358	100,97%
16	406695	Rutan Kuala Kapuas	7.343.968.000	3.285.675.000	4.058.293.000	-	7.303.193.181	99,44%
17	408633	Rutan Buntok	4.652.847.000	2.844.381.000	1.808.466.000	-	4.705.540.505	101,13%
18	683753	Rutan Tamiang Layang	3.841.377.000	1.592.182.000	2.249.195.000	-	4.034.024.018	105,02%
19	109138	Bapas Palangka Raya	2.595.402.000	1.758.816.000	836.586.000	-	2.758.344.336	106,28%
20	626178	Bapas Pangkalan Bun	1.533.114.000	1.008.575.000	524.539.000	-	1.595.603.256	104,08%
21	653150	Bapas Muara Teweh	1.140.267.000	654.796.000	485.471.000	-	1.119.898.832	98,21%
22	632641	Rupbasan Palangka Raya	1.733.627.000	1.229.255.000	504.372.000	-	1.792.648.681	103,40%
23	418367	Lapas Kelas III Sukamara	2.890.697.000	2.141.293.000	749.404.000	-	3.092.051.625	106,97%
24	418332	Lapas Perempuan	3.580.599.000	2.397.054.000	1.183.545.000	-	3.670.501.503	102,51%
25	352607	Lapas Khusus Anak	2.912.411.000	2.072.558.000	839.853.000	-	3.039.718.206	104,37%
26	408448	Kanim Palangka Raya	7.792.249.000	2.196.741.000	3.537.880.000	2.057.628.000	7.737.907.077	99,30%
27	409072	Kanim Sampit	4.426.184.000	2.379.970.000	2.046.214.000	-	4.260.306.245	96,25%
JUMLAH			112.417.333.000	54.237.813.000	56.121.892.000	2.057.628.000	113.633.377.214	100,75%

Dari tabel di atas terlihat realisasi belanja sebesar Rp 113.633.377.214,- melebihi/lebih besar dari pagu anggaran sebesar Rp 112.417.333.000,- hal ini disebabkan pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 14 (empat belas) Satuan Kerja pada UPT Pemasarakatan yang memiliki Pagu Minus pada belanja pegawai, dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian pagu minus / revisi pagu minus oleh Unit Eselon I di tingkat nasional.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2019 tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 telah dilaksanakan maksimal sesuai dengan program dan kegiatan ;
2. Realisasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2019 per 31 Desember 2019 sebesar 100,75% masih menunggu selesainya proses revisi pagu minus yang sedang dilakukan Unit Eselon I di tingkat nasional ;

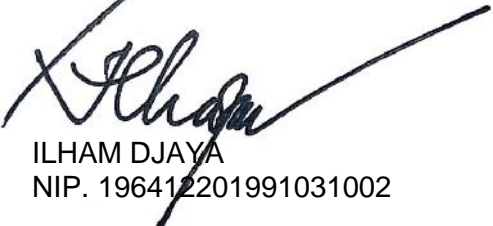
4.2 Saran

Agar pelaksanaan seluruh kegiatan dan kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada masa yang akan datang dapat meningkat dan berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu :

1. Penguatan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia ;
2. Pembinaan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2019 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

Kepala Kantor Wilayah,



ILHAM DJAYA
NIP. 196412201991031002